

POTENSI DAN TANTANGAN KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA-KOREA SELATAN

Adrini Pujayanti

7

Abstrak

Deklarasi Bersama Penyelesaian Perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Republik Indonesia dan Republik Korea (Korea Selatan) resmi ditandatangani menteri perdagangan kedua negara pada tanggal 25 November 2019. Penandatanganan deklarasi disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 30 Tahun Hubungan Kemitraan ASEAN-Korsel di Busan. Dengan penandatanganan deklarasi tersebut, kedua negara lebih maju menuju penandatanganan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) yang ditargetkan pada awal 2020. Perjanjian tersebut sudah dimulai tahun 2012, kemudian lima tahun terhenti, sebelum akhirnya disetujui untuk disepakati kedua pihak. Kedua negara membangun kemitraan strategis pada tahun 2017. Pada tahun 2019 hubungan Indonesia-Korea Selatan yang telah berlangsung selama 46 tahun terus menunjukkan kemajuan. Pasca-deklarasi bersama penyelesaian perundingan IK-CEPA November 2019, DPR melalui fungsi pengawasan perlu mengawal dan memastikan agar IK-CEPA dapat segera terwujud dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian Indonesia. Tulisan singkat ini dibahas potensi dan tantangan kerja sama ekonomi Indonesia-Korea Selatan.

Pendahuluan

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 30 Tahun Kerja Sama ASEAN-Korea Selatan (ASEAN-RoK *Commemorative Summit*), Korea Selatan dan Indonesia mendeklarasikan bersama penyelesaian perundingan kemitraan ekonomi komprehensif. Penandatanganan deklarasi secara resmi dilakukan oleh menteri perdagangan kedua negara pada tanggal 25 November 2019, disaksikan Presiden Joko Widodo

dan Presiden Moon Jae-in, di sela KTT. Proses negosiasi ini merujuk pada kerangka standar seperti *ASEAN-Korea Free Trade Agreement*. Dengan penandatanganan deklarasi tersebut, kedua negara lebih maju menuju penandatanganan *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* yang ditargetkan pada awal 2020. IK-CEPA adalah kemitraan komprehensif bidang perdagangan barang, jasa, investasi, ketentuan asal barang, serta kerja sama ekonomi.



Penyelesaian IK-CEPA akan menjadi tonggak sejarah baru dalam hubungan ekonomi kedua negara.

Pada tahun 2019 hubungan Indonesia-Korea Selatan yang telah berlangsung selama 46 tahun terus menunjukkan kemajuan. Kedua negara membangun kemitraan strategis pada tahun 2017. Kerja sama kedua negara terus meningkat di berbagai bidang. Indonesia merupakan mitra penting bagi Korea Selatan. Eratnya hubungan dan kerja sama bilateral tersebut antara lain didukung oleh sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan yang dimiliki masing-masing, di samping proses kemajuan ekonomi dan politik kedua negara yang membuka peluang kerja sama di berbagai sektor semakin terbuka lebar. Berdasarkan hal tersebut, tulisan singkat ini hendak mengkaji potensi dan tantangan kerja sama ekonomi Indonesia-Korea Selatan.

New Southern Policy Korea Selatan

Korea Selatan di bawah pemerintahan Presiden Mon Jae-in memiliki kebijakan luar negeri *New Southern Policy/NSP* (Kebijakan Baru ke Arah Selatan). Kebijakan ini merupakan upaya pemerintahan Moon Jae-in untuk melepas ketergantungan Korea Selatan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS), China, Jepang, dan Rusia. Melalui inisiasi ini, Korea Selatan memperluas jaringan kerja samanya dengan negara-negara di belahan bumi selatan, yakni negara ASEAN dan India.

NSP mengarah pada kepentingan ekonomi Korea Selatan di Asia Tenggara dan India. Pemerintahan Mon Jae-in berusaha

membangun kemitraan untuk perdamaian dan kemakmuran (*partnership for peace and prosperity*) dengan Asia Tenggara demi masa depan bersama dan penekanannya adalah pada aspek sumber daya manusia (SDM). Dasar kebijakan Presiden Mon Jae-in adalah pertama, negara-negara ASEAN merupakan salah satu titik kawasan pertumbuhan secara ekonomi, politik, dan budaya. Kedua, perang dagang AS-China dan penurunan ekonomi China yang mendorong Korea Selatan untuk melihat alternatif pasar di ASEAN. Ketiga, hubungan *people to people* Korea Selatan dan ASEAN yang semakin hari semakin meningkat.

Indonesia bagi Korea Selatan merupakan mitra penting. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha, pernah menyatakan bahwa posisi Indonesia sebagai mitra utama dalam NSP. Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi Korea Selatan yang penting di luar negeri, dengan nilai investasi sebesar USD8,5 miliar. Indonesia menempati urutan ke-2 setelah Vietnam di antara 8 negara ASEAN (Kemlu, 2019).

Dalam kerangka implementasi NSP, kunjungan pertama Presiden Moon ke luar negeri pada bulan November 2017 adalah ke Indonesia. Dengan prinsip "*Republic of Korea-Republic of Indonesia Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace*", kedua pemimpin negara sepakat untuk meningkatkan status kemitraan menjadi *special strategic partnership*, dengan fokus kerja sama pada empat area, yaitu: pertahanan dan hubungan luar negeri, perdagangan bilateral dan pembangunan infrastruktur, *people-to-people exchanges*, dan kerja sama regional dan global. Status *special strategic partnership* tersebut

dilandaskan pada semangat kesamaan prinsip dan nilai-nilai demokrasi, HAM, dan ekonomi terbuka. Kedua pemimpin juga sepakat bahwa kemitraan kedua negara bukanlah sekedar hubungan transaksional tetapi harus dilandasi semangat saling membantu.

Potensi Kerja Sama melalui IK-CEPA

Jika melihat perjalanan hubungan Indonesia-Korea Selatan, setidaknya sejak "*RI-RoK Joint Vision Statement for Co-Prosperty and Peace*" dikeluarkan pada 9 November 2017 di istana Bogor, kerja sama kedua negara, termasuk di bidang ekonomi, semakin meningkat. Visi bersama tersebut menjadi landasan bagi bidang-bidang prioritas kerja sama kedua negara.

Untuk bidang ekonomi, prioritas kerja sama yang disepakati antara lain: 1) Meningkatkan komunikasi strategis pada tingkat tinggi melalui berbagai mekanisme konsultasi bilateral yang ada, ataupun membentuk mekanisme baru; 2) Terus meningkatkan dan memperluas hubungan investasi dan perdagangan, termasuk untuk mencapai target perdagangan USD30 miliar di tahun 2022 serta mendorong peningkatan akses pasar produk-produk palm oil, buah-buahan, dan produk perikanan Indonesia ke Korea Selatan; 3) Pemerintah Indonesia mendorong perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk mengembangkan usaha dan investasi di Indonesia, khususnya dalam mendukung percepatan industrialisasi, pengembangan infrastruktur dan konektivitas, serta pertumbuhan dan pembangunan di daerah-daerah; 4) Pemerintah Korea

Selatan mendukung upaya Indonesia untuk memperkuat infrastruktur termasuk pengelolaan air, transportasi, perumahan rakyat, dan pembangkit tenaga listrik, dengan menggunakan *Global Infrastructure Fund dan Economic Development Cooperation Fund*; 5) Kedua negara sepakat untuk memfasilitasi investasi di bidang-bidang pertumbuhan baru (*new growth engine*) seperti pariwisata, konten industri, energi ramah lingkungan, kesehatan dan jasa pelayanan medis, dan teknologi informasi; 6) Memulai kerja sama triangular untuk membantu pembangunan di negara ketiga.

Korea Selatan merupakan salah satu negara sumber investasi yang strategis bagi Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri, nilai perdagangan kedua negara pada 2018 mengalami kenaikan signifikan sebesar 15% dengan nilai total mencapai USD20 miliar. Selain itu, realisasi investasi Korea Selatan dalam lima tahun terakhir mencapai USD7 miliar, jumlah tersebut menjadikan Korea Selatan sebagai investor terbesar keenam di Indonesia (Kemlu, 2019). Presiden Joko Widodo berharap besar pada investasi Korea Selatan setelah China dan Jepang tidak memilih Indonesia sebagai negara tempat relokasi sejumlah perusahaannya (Kompas, 27 November 2019).

Sebelumnya, pada tahun 2012, Indonesia dan Korea Selatan sudah sepakat untuk menyusun *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership (IK-CEPA)* untuk mendorong peningkatan hubungan perdagangan dan ekonomi, dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama, yaitu akses pasar perdagangan barang dan jasa, fasilitasi

perdagangan dan investasi, serta kerja sama *capacity building*. Perundingan IK-CEPA terhenti pada putaran ketujuh pada tahun 2014 karena terdapat sejumlah isu yang sulit untuk disepakati. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Korea Selatan, September 2018, pemimpin kedua negara kembali memperbaharui komitmen untuk melanjutkan perundingan IK-CEPA. Kedua pihak sepakat menjajaki dimulainya kembali perundingan IK-CEPA dengan memperhatikan prinsip mencapai keuntungan bersama.

Perjanjian IK-CEPA mencakup enam kelompok kerja, yaitu terkait: perdagangan barang dan jasa; investasi; ketentuan asal barang dan prosedur kepabeanan; fasilitas perdagangan; kerja sama pengembangan kapasitas; serta isu hukum dan kelembagaan. Dengan perjanjian tersebut, nantinya Indonesia akan mendapatkan akses pasar untuk produk industri, termasuk perikanan dan hortikultura di Korea Selatan.

Sementara sebagai timbal baliknya, Indonesia akan memberikan akses pasar untuk bahan baku industri serta memfasilitasi berbagai investasi Korea Selatan di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendorong nilai perdagangan kedua negara dan investasi Korea Selatan di Indonesia. Di samping itu, pada sektor perdagangan jasa, Indonesia akan mendapatkan skema khusus untuk tenaga kerja. Dengan demikian, IK-CEPA menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, di mana Indonesia dan Korea Selatan memerlukan terobosan untuk mendorong perdagangan dan investasi di antara kedua negara. Melalui IK-CEPA, potensi kerja sama

ekonomi di antara kedua negara diharapkan juga akan semakin menguat.

Tantangan Indonesia

Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang menjalin mitra strategis khusus dengan Korea Selatan. Dalam IK-CEPA akan tercipta perdagangan produk-produk yang sifatnya saling melengkapi dan mendorong investasi Korea Selatan ke Indonesia. Adanya IK CEPA akan memudahkan transaksi kerja sama industri antara kedua negara. Melalui IK-CEPA akan ada *value change industry* yang diharapkan dapat meningkatkan perdagangan kedua negara.

Indonesia dan Korea Selatan menargetkan nilai perdagangan kedua negara sebesar USD30 miliar pada tahun 2022. Dengan IK-CEPA, ditargetkan ekspor Indonesia ke Korea Selatan akan meningkat 20% (swa.co.id.,2019). Korea Selatan telah menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia di berbagai sektor, seperti industri makanan, industri tekstil, industri kimia dan farmasi, industri logam, mesin, serta industri elektronik.

Salah satu tantangan besar dalam perdagangan kedua negara adalah komposisi ekspor Indonesia yang sebagian masih tergantung pada harga-harga komoditi dasar seperti batu bara. Untuk itu potensi produk ekspor Indonesia perlu menjadi lebih variatif. Harus ada terobosan bagi Indonesia untuk mengeksport produk yang lebih beragam dengan memanfaatkan *joint venture* antara perusahaan Korea Selatan dan Indonesia.

IK-CEPA harus menciptakan keragaman industri dalam negeri dan

pasar ekspor yang penting di tengah pelemahan perekonomian global dan perang dagang. Indonesia harus dapat mengatasi ketertinggalan hak khusus dalam perdagangan dengan Korea Selatan. Hal tersebut telah dinikmati oleh negara-negara yang telah menandatangani perjanjian sejenis dengan Korea Selatan. IK-CEPA harus bisa menarik investor Korea Selatan dan mendorong reformasi ekonomi domestik. Perubahan demi percepatan ekonomi dalam negeri dibutuhkan agar Indonesia semakin mampu bersaing secara global dan menjadi bagian dari rantai pasok global.

Penutup

Peningkatan perekonomian masing-masing negara menjadi dasar bagi Indonesia dan Korea Selatan untuk memperkuat kerja sama. Meskipun sejumlah tantangan masih dihadapi Indonesia, potensi kerja sama harus dikembangkan dan ditingkatkan oleh kedua negara sebagai tindak lanjut dari IK-CEPA. Hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang sudah menyetujui CEPA dengan Korea Selatan.

Indonesia menjadi prioritas dari *new southern policy* Korea Selatan sehingga kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Pemerintah perlu lebih aktif mempromosikan peluang bisnis di Indonesia dan menyiapkan peran yang lebih strategis kepada Atase Perdagangan dan *Indonesian Trade Promotion Center* di Korea Selatan dalam peningkatan ekspor sebagai wujud implementasi IK-CEPA. Terkait hal ini, DPR melalui fungsi pengawasan, perlu mengawal dan memastikan agar kerja sama ekonomi

Indonesia dan Korea Selatan dapat terus meningkat dan membawa kemajuan bagi perekonomian Indonesia.

Referensi

- “Perjanjian Dagang - Keragaman Pasar dan Sumber Dana Naik”, *Kompas*, 25 November, 2019, hal.1.
- “Indonesia-Korea CEPA Ditargetkan Selesai November 2019”, *swa.co.id*, 18 September 2019, <https://swa.co.id/swa/trends/economic-issues/indonesia-korea-cepa-ditargetkan-selesai-november-2019> diakses 25 November 2019.
- “Mangkrak 5 Tahun, Akhirnya RI-Korsel Sepakati Perjanjian Dagang”, *detik.com*, 16 Okt 2019, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4748187/mangkrak-5-tahun-akhirnya-ri-korsel-sepakati-perjanjian-dagang>, diakses 25 November 2019
- “RI- Korea Selatan Selesaikan Perundingan Perdagangan Bebas”, *cnn.indonesia*, 17 Oktober 2019. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191017055548-92-440192/ri-korea-selatan-selesaikan-perundingan-perdagangan-bebas>, diakses 25 November 2019.
- “Laporan dari Busan RI Mau Deklarasi Kerja Sama Dagang dengan Korsel”, *finance.detik.com*, 25 Nov 2019, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4796819/ri-mau-deklarasi-kerja-sama-dagang-dengan-korsel> diakses 25 November 2019.
- Kementerian Luar Negeri. (2019). “Profil Negara dan Hubungan Bilateral”, *kemlu.go.id*, https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu, diakses 25 November 2019.
- “Menlu Korsel Sebut Indonesia Mitra Utama dalam New Southern Policy”, *kabar24.bisnis.com*, 8 April

2019, <https://kabar24bisnis.com/read/20190408/19/909192/menlu-korsel-sebut-indonesia-mitra-utama-dalam-new-southern-policy> diakses 25 November 2019.

“Korea’s New Southern Policy: Motivations of ‘Peace Cooperation’ and Implications for the Korean Peninsula”, *enasaninst.org*, 21 Juni 2019, <http://enasaninst.org/contents/koreas-new-southern-policy-motivations-of-peace-cooperation-and-implications-for-the-korean-peninsula/> diakses 25 November 2019.

“Indonesia-Korea Selatan Kerja Sama Sepakat Diperluas”, *Kompas*, 26 November 2019, hal.1.

“Tonggak CEPA Indonesia - Korsel”, *Kompas*, 27 November 2019, hal.6.

“PMA di Indonesia 10 Korporasi Korsel Siap Berekspansi”, *Kompas*, 27 November 2019, hal.13.

“Indonesia Gandeng Korsel Bangun Ibu Kota Baru”, *Suara Pembaruan*, 26 November 2019, hal.15.

“KTT ASEAN-Korsel Kemakmuran Menjadi Fokus Bersama”, *Media Indonesia*, 27 November 2019, hal.1.



Adrini Pujayanti
adrini.pujayanti@dpr.go.id

Dra. Adirini Pujayanti, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional, Universitas Nasional pada tahun 1992 dan pendidikan program Magister (S2) Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia pada tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kebijakan Luar Negeri Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia” (2015), “Parlemen dan Interfaith Dialogue: Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan dan Perdamaian Dunia” (2015), “Diplomasi Ekonomi Bidang Perdagangan Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo” (2015), dan “Ekonomi Kreatif sebagai Nation Brand Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN” (2016)

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.